**RISALAH KLARIFIKASI PERSELISIHAN**

**HUBUNGAN INDUSTRIAL**

1. Nama Perusaha :
2. Jenis Usaha :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nama Pekerja / Buruh / SP / SB :
5. Alamat Pekerja / Buruh / SP / SB :
6. Tanggal dan Tempat Perundingan :
7. .Pokok Masalah / Alasan Perselisihan:
8. Keterangan / Pendapat :

Pekerja / Buruh / SP/ SB

1. Keterangan / Pendapat Pengusaha :
2. Arahan Mediator :
3. Kesimpulan / Hasil Klarifikasi :

Keterangan : dalam membuat kesimpulan atau hasil klarifikasi agar ditegaskan penyelesaian perselisihannya. Ada 3 alternatif, yaitu a) sepakat untuk melakukan perundingan bipartit; atau b) sepakat akan melanjutkan penyelesaian melalui mediasi dengan hasil perjanjian bersama; atau c) sepakat akan melanjutkan penyelesaian melalui mediasi dengan hasil anjuran.

Kudus,,…………………….

Mediator Hubungan Industrial,

……………………………….

NIP.

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Pencatatan Perselisihan

Hubungan Industrial

Yth. Kepala Dinas…………………………..

………………………………………………

Di

………………….

Dengan hormat disampaikan bahwa kami telah melakukan upaya maksimal untuk penyelesaian Perselisihan hubungan industrial antara:

1. Nama Perusahaan :
2. Jenis Usaha :
3. Alamat :

Dengan

1. Nama Pekerja / Buruh / SP / SB :
2. Pokok Perselisihan: :

……………………………………………………………………………………………………...

Dari upaya yang dilakukan tersebut, pihak …………. (pengusaha/ pekerja/ buruh/ SP/ SB) menolak untuk berunding / tidak tercapai kesepakatan \*). Hal ini kami sampaikan sebagaimana risalah perundingan bipartit terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kami mohon perselisihan tersebut dicatat dan mohon bantuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

Pengusaha/ Pekerja/ Buruh/ SP/ SB \*),

….…………………..

\*) Pilih salah satu

Nomor :

Lampiran :

Hal : Tanggapan atas Permohonan

Pencatatan Perselisihan

Hubungan Industrial

Yth. 1. Sdr. …………………( Pengusaha)

2.Sdr…………………..( Pekerja/ Buruh/ SP / SB)

Di

………………….

Sehubungan dengan surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial saudara nomor……………. tanggal..………yang kami terima pada tanggal……..dengan disampaikan sebagai berikut:

1. Permohonan pencatatan perselisihan hubunga industrial saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena belum melampirkan bukti- bukti penyelesaian secara bipartit / Risalah Perundingan.
2. Diminta kehadiran Saudara apda:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Bertemu dengan : Sdr.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

………………………….

NIP

Nomor :

Lampiran :

Hal : Tanggapan atas Permohonan

Pencatatan Perselisihan

Hubungan Industrial

Yth. 1. Sdr. …………………( Pengusaha)

2.Sdr…………………..( Pekerja/ Buruh/ SP / SB)

Di

………………….

Sehubungan dengan surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial Saudara nomor……………. tanggal..………yang kami terima pada tanggal……..dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kami menawarkan kepada Saudara untuk memilih penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Konsiliator atau Arbiter.

Untuk hal tersebut, diminta kehadiran saudara pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Bertemu dengan : Sdr.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

………………………………

NIP.

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pelimpahan Kepada Mediator

Hubungan Industrial

Yth. 1. Sdr. …………………( Pengusaha)

2.Sdr…………………..( Pekerja/ Buruh/ SP / SB)

Di

………………….

Dengan ini disampaikan bahwa sebagaimana surat kami nomor ………… tanggal ………. Terkait penawaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan melalui konsiliator atau arbiter dan mengingat bahwa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja ternytaa Saudara tidak menetapkan pilihan atau tidak memberi jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial kami limpahkan kepada Mediator Hubungan Industrial.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran Saudara pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Bertemu dengan : Sdr.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

………………………………

NIP.

SURAT TUGAS

Nomor ………………………….

Pertimbangan : Bahwa sesuai mekanisme , penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan Hubungan Industrial, maka perlu menunjuk Mediator Hubungan Industrial;

Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor …………….. tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

MENUGASKAN

Kepada : Nama :

NIP :

Pangkat / Gol :

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial

Untuk : 1. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara PT ………………… dengan saudara ……….. (Pekerja/ Buruh/ SP / SB \*)).

2. Melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Tugas dikeluarkan.

3. Melaporkna hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Jaminan Sosial tenaga Kerja (untuk Mediator Kementrian) / Gubernur …………………. (*untuk Mediator Provinsi*) / Bupati / Walikota \*) ……………. Provinsi…… (*untuk Mediator Kabupaten/ Kota)*

Demikian Surat Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Kepala Dinas,

……………………

NIP.

Nomor :

Lampiran :

Hal : Panggilan Klarifikasi /

Sidang Mediasi I / II / III \*)

Yth. 1. Sdr. …………………( Pengusaha)

2.Sdr…………………..( Pekerja/ Buruh/ SP / SB)

Di

………………….

Sehubungan dengan surat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Saudara sebagaimana surat nomor……………. tanggal..………yang kami terima pada tanggal……..dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *Juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ……….. tentang pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, dengan ini diminta kehadiran Saudara pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Bertemu dengan : Sdr.

Masing- masing pihak diminta kehadirannya tepat waktu dengan membawa data/ berkas yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

……………………

NIP.

\*) Coret salah satu

Nomor :

Lampiran :

Hal : Panggilan Saksi / Saksi Ahli

Yth. 1. Sdr. …………………( Pengusaha)

2.Sdr…………………..( Pekerja/ Buruh/ SP / SB)

Di

………………….

Sehubungan dengan surat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT. ……………………….. (Perusahaan) dengan Sdr. …………. (Pekerja/ Buruh/ SP / SB) dan sesuai ketentuan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kmai mohon kehadiran saudara untuk menjadi Saksi / Saksi Ahli dalam sidang mediasi pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Bertemu dengan : Sdr.

Berkenaan dengna hal tersebut, diminta Saudara hadir tepat waktu dan membawa data/ berkas yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

……………………

NIP.

PERJANJIAN BERSAMA

Pada hari ini …………tanggal…… bulan……… tahun……….. kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pihak Pengusaha

1. Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pihak Pekerja/ Buruh/ SP / SB\*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, antara Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja/ Buruh/ SP / SB\*) telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi sebagai berikut:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani diatas materai cukup

Demikian perjanjian bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

Pihak Pengusaha, Pihak Pekerja/ Buruh/ SP / SB,

…………………………. ……………………………

Menyaksikan

Mediator Hubungan Industrial

……………………………….

NIP.

Nomor :

Lampiran :

Hal : Anjuran

Yth. 1. Sdr. …………………( Pengusaha)

2.Sdr…………………..( Pekerja/ Buruh/ SP / SB)

Di

………………….

Sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT. …………….. dengan Sdr. ……………….. yang telah dilaksanakan melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan anjuran.

Sebagaimana bahan pertimbangan, mediator perlu mendengar keterangan kedua belah pihka yang berselisih sebagai berikut:

1. Keterangan Pihak Pekerja/ Buruh/ Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
2. …
3. …

Dan seterusnya.

1. Keterangan Pihak Pegusaha
2. …
3. …

Dan seterusnya.

1. Keterangan Saksi / Saksi Ahli (Jika dipandang perlu)
2. …
3. …

Dan seterusnya

1. Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Berdasarkan hal- hal tesebut diatas dan guna menyelesaikan masalah dimaksud, dengan ini mediator :

MENGANJURKAN

1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat- lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

Demikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Mengetahui Mediator Hubungan Industrial

Kepala Dinas

…………………………. ………………………………

NIP NIP

**RISALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**HUBUNGAN INDUSTRIAL**

1. Nama Perusahaan :
2. Jenis Usaha :
3. Alamat Pengusaha :
4. Nama Pekerja/ Buruh/ SP/ SB :
5. Alamat Pekerja/ Buruh/ SP/ SB :
6. Tanggal dan Tempat Perundingan :
7. Pokok Masalah/ Alasan Perselisihan :……………………………………………………..
8. Pendapat Pekerja / Buruh / SP/ SB :……………………………………………………..
9. Pendapat Pengusaha :…………………………………………………….
10. Kesimpulan atau Hasil Perundingan :……………………………………………………..

Kudus,………………………..

Mediator Hubungan Industrial,

……………………………….

NIP

**DAFTAR HADIR**

HARI / TANGGAL :

PUKUL :

TEMPAT :

ACARA : SIDANG I / II / III

PERMASALAHAN :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **ALAMAT** | **PENGUSAHA/**  **PEKERJA/ BURUH/ SP/ SB** | **TANDA TANGAN** | **KET** |
|  |  |  |  |  |  |

Nomor :

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Mediasi

Yth.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos (*untuk Mediator Kementrian*) /

Kepala Dinas ………… Provinsi ………. (untuk *Mediator* Provinsi) /

Kepala Dinas ………… Kabupaten / Kota \*) ……..Provinsi …….. (untuk Mediator Kab / Kota)

Di

………………….

Sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

1. Tanggal penerimaan pengaduan :

Tertulis

1. Nama Pekerja/ Buruh/ SP/ SB :
2. Alamat Pekerja/ Buruh/ SP/ SB :
3. Upah terakhir :
4. Masa Kerja :
5. Nama Perusahaa :
6. Alamat Perusahaan :
7. Jenis Usaha :
8. Waktu Penyelesaian Mediasi :
9. Permasalahan :
10. Pendapat Pekerja / Buruh/ SP/ SB :
11. Pendapat Pengusaha :
12. Pendapat Saksi/ Saksi Ahli :

(bila perlu)

1. Upaya penyelesaian :

Demikian kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.

Mediator hubungan industrial,

………………………………

NIP

Bulan: ……………….. Tahun ……………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tanggal pencatatan | Pihak yang mencatat | Pihak yang berselisih | | Jenis Perselisihan Hubungan Industrial | | | | Tuntutan | Proses Penyelsaian | | | | | | Tindak Lanjut | | Ket |
| Pihak pekerja / SP | Pihak Pengusaha | Hak | Kepentingan | PHK | Antar SP/ SB | Bipartit | Klarifikasi | Mediasi | PB | Anjuran | Risalah Mediasi | PHI | MA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |